

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata akan turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional, karena pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan lainnya. Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan pengembangan pariwisata nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperkenalkan alam dan nilai-nilai budaya bangsa, serta memupuk rasa cinta tanah air.

Pembangunan di sektor pariwisata ini akan melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan lapisan atas hingga lapisan bawah. Baik kalangan pemerintah, swasta, maupun kalangan masyarakat biasa. Partisipasi masyarakat di sekitar obyek pariwisata dapat berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung berupa pemanfaatan peluang pasar dalam bentuk usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan pemasaran sarana penunjang pariwisata. Sehingga pengembangan obyek pariwisata akan dapat memberi penghasilan terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian akan dapat meningkatkan pendapatannya. Sedangkan partisipasi yang tidak langsung dapat berupa pemeliharaan situasi dan kondisi obyek wisata yang

mendorong wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut dan tinggal lebih lama, sehingga dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru berupa pelayanan terhadap kebutuhan wisatawan selama tinggal pada obyek wisata tersebut.

Pembangunan pariwisata pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang berupa obyek dan daya tarik wisata yang terwujud, antara lain kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, keanekaragaman bentuk kesenian / tradisi serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pariwisata merupakan bentuk ekspor yang dianggap menguntungkan terutama bidang ekonomi nasional, di samping masyarakat di suatu negara. Menurut James J. Spillane, keinginan untuk meningkatkan kegiatan di bidang pariwisata antara lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa, jika dibandingkan dengan waktu yang lalu.
2. Merosotnya nilai-nilai ekspor di sekitar non migas.
3. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan secara konsisten.
4. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.¹

Sejauh ini, pariwisata maupun obyek pariwisata yang ada di Pacitan tidak banyak mengalami perkembangan. Maka tidak mengherankan jika

masyarakat di Pacitan tidak banyak merasakan dampak pariwisata untuk peningkatan perekonomian mereka. Telah dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwasannya pembangunan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang bersifat kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja, pendapatan daerah dan penerimaan devisa bisa meningkat. Tentu saja hal tersebut dapat tercipta apabila diikuti dengan adanya kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun arah kebijakan pariwisata dalam PJP II adalah :

1. Kepariwisata nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan wilayah.
2. Kepariwisata nasional harus berwawasan politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya dan hankam secara bulat dan utuh.
3. Kepariwisata nasional harus memberikan kesempatan perusahaan dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi perorangan maupun kelompok masyarakat Indonesia.
4. Pembangunan kepariwisataan nasional melibatkan secara aktif berbagai sektor pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu.
5. Pembangunan kepariwisataan nasional, harus diikuti langkah-langkah pencegahan dan penangkalan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul.
6. Pembangunan kepariwisataan nasional harus secara luas memperhatikan

Agar sektor pariwisata dapat menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan pemerintah dunia usaha maupun masyarakat umum menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Pembangunan pariwisata dalam kegiatannya hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan yang sangat dipengaruhi dan memerlukan dukungan masyarakat ataupun umum yang terkoordinasi.

Dalam kondisi yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan hal yang pokok dalam menentukan berhasil dan tidaknya suatu tujuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam kaitannya dengan F. Siagian berpendapat bahwa:

“Sesungguhnya pada analisa terakhir persoalan administrasi adalah persoalan manusia. Tidak ada kegiatan orang dapat berlangsung tanpa manusia, terlepas dari lengkapnya fasilitas, besarnya biaya yang tersedia, modernnya perlengkapan dan majunya ilmu pengetahuan serta mutakhirnya teknologi.”³

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Indra Wijaya sebagai berikut:

“Manusia dan hanya manusia satu-satunya yang merupakan sumber utama organisasi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun, bagaimana baiknya organisasi, lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas kerjasama tidak akan mempunyai arti tanpa ada manusia yang mengatur, menggunakan dan memelihara.”⁴

³ Sondang P. Siagian, *Peranan Staff dalam Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1980,

Kedua pendapat di atas tersebut, menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan manusia. Karena itu, merupakan tuntutan yang mutiak bagi semua jajaran pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar dapat menunjukkan citranya yang bermutu dalam membantu tugas-tugas pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Stear bahwa:

“Hasil yang dicapai oleh suatu organisasi adalah tergantung pada kerja masing-masing pegawai”⁵

Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata, di mana di daerah ini terdapat beberapa obyek pariwisata yang cukup menarik dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar menjadi obyek wisata andalan yang dapat menarik tambahan pemasukan pendapatan daerah.

Dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata tersebut dikelola oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ini bertugas dalam upaya memajukan obyek-obyek yang ada, seperti menyediakan sarana dan prasarana pariwisata, menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di obyek wisata.

Penulis tertarik untuk meneliti peran dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan, karena penulis melihat bahwa terdapat beberapa obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam upaya pengembangannya.

Namun, sejauh ini belum nampak adanya perkembangan yang berarti, dan pengunjung pariwisata yang ada di Pacitan, pada tahun 2003-2005 terus mengalami penurunan. menurut keterangan dari Ibu Efi Ifita, penurunan jumlah pengunjung ini menurun akibat penurunan pengunjung pariwisata secara global di Indonesia mengalami penurunan akibat adanya bencana alam, peristiwa pengeboman di berbagai daerah di Indonesia, dan lain-lain. Padahal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan telah melakukan promosi, seperti talk show, hingga ke kota lain, seperti Semarang dan sekitarnya. Dan sejauh ini, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan hanya menangani 9 dari 13 obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan, karena obyek- obyek wisata lainnya tidak banyak mempunyai pengunjung, belum mempunyai banyak fasilitas, dan rata-rata letaknya sulit dijangkau, atau jauh dari pusat kota.⁶

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Di Kabupaten Pacitan Pada Tahun 2003-2005

Tahun	Wisman		Wisnus		Jumlah keseluruhan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2003	702	6.77 %	422.825	17.69 %	423.527	16,2 %
2004	603	14,10%	396.150	6,30 %	396.753	6,32 %
2005	334	80,53%	291.613	26,38 %	291.947	26,42 %

Sumber data: Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka kajian skripsi ini adalah bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

⁶ Wawancara dengan Ibu Efi Ifita, Pegawai Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pacitan, Pada hari Jum'at, 22 Desember 2006

Kabupaten Pacitan dalam pengembangan sektor pariwisata tahun 2003-2005, dengan mengambil judul “PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2003-2005.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Tahun 2003-2005.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan Jawa Timur Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Tahun 2003-2005.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pengembangan atau pembangunan pariwisata.
- b. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi perkembangan ilmu

kepariwisataan dan penelitian sejenis pada

- c. Mengetahui peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke lokasi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Sebelum penulis mengemukakan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, ada baiknya bila penulis mengemukakan definisi teori terlebih dahulu. Menurut pendapat Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya.”⁷

Sedangkan menurut Koentjoroningrat :

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori ini merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan yang sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *METODE PENELITIAN SURVEY*, LP3ES, Jakarta, 1990 hal 4

1. Peran

Peran adalah turut serta memikul dan bertanggung jawab akan keberhasilan pembangunan yang secara jelas telah disebutkan dalam GBHN dengan kalimat sebagai berikut;

“Partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan.”⁹

Peran, menurut Susanto adalah:

“Role/peran merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status obyektif. Antara peranan dan status saling berkaitan satu sama lainnya. Karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan”¹⁰

Peran menurut Soerjono Soekanto

“Aspek dinamis dari seseorang pada kedudukan (status), jadi bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya.”¹¹

Dari pengertian-pengertian tersebut dikatakan bahwa peran yang dijalankan sangat ditentukan oleh status dan kedudukan yang dijabatnya. apabila seseorang atau suatu subyek berperilaku sesuai atau melaksanakan hak-hak dan kewajibann karena kedudukan atau statusnya, maka ia telah

⁹ GBHN, Ghalia Indonesia, Jakarta 1999, hal. 5

¹⁰ Phil Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hal 7

menjalankan peran yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peran ini, oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan dirumuskan dalam suatu program, yang diharapkan akan dapat membantu dan mempermudah mencapai tujuan yang telah ditentukan. program-program pengembangan yang dilakukan adalah; promosi pariwisata dan hasil-hasil kerajinan, pelatihan SAR, pembangunan fasilitas atau sarana penunjang di kawasan obyek wisata, dll.¹²

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian wisata, yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan pengertian dari pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pendapat lain mengenai pengertian pariwisata juga dikemukakan oleh Oka A. Yoety, yaitu:

¹² Berita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan

“Pariwisata adalah pengalaman mendatangi atau mengunjungi dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam.”¹³

Hal itu jelas menggambarkan bahwasannya pariwisata juga kegiatan yang bisa melibatkan emosi seseorang, di mana emosi tersebut bersifat spontanitas dan bersifat sementara dengan kata lain ekspresi dari tiap individu berlainan cara dan bentuk penampilannya. Hal demikian juga berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai perwujudan manusia tentang perwujudan hidup serta sosial budaya dan sejarah.

b. Manfaat pariwisata

Manfaat pariwisata di dalam pembanguana mencakup beberapa segi, yaitu :

1). Segi ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu negara.

¹³ Oka A. Yasta, *Sumatera (M. Pariwisata, Analisis, Dan ...)*, 1995, hal. 115

2). Segi seni budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi, atau menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

3). Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya bila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

4). Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan.

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya.

5). Memperluas kesempatan kerja

Industri Pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan uang sangat banyak

mudah dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.

6). Menunjang perbaikan kesehatan dan prasarana kerja.

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu.¹⁴

c. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata itu ditujukan kepada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana yang lain atau yang baru dari rutinitas sehari-hari. Sasaran pariwisata bagi masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1). Bagi wisatawan domestik dalam negeri atau wisatawan domestik.

Sasaran pariwisata ini khusus ditujukan bagi masyarakat di dalam negeri itu sendiri.

2). Bagi wisatawan luar negeri atau wisatawan manca negara.

Sasaran pariwisata ditujukan bagi wisatawan-wisatawan manca negara agar mereka tertarik untuk datang berkunjung, tentunya dengan menonjolkan kelebihan atau daya tarik suatu obyek wisata.

d. Obyek wisata

Menurut UU RI No.9 Tahun 1990, Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Sedangkan pendapat lain menerangkan bahwa definisi dari obyek wisata adalah:

“Obyek wisata merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan.”¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan obyek wisata adalah suatu tempat yang memiliki daya tarik dan bisa dikunjungi serta dinikmati keindahannya oleh manusia.

3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau negara.

Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan

manfaat bagi seluruh bangsa. Alasan pengembangan pariwisata tersebut

”Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.”

Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan sawah ladang.

Pariwisata perlu dikembangkan untuk menghilangkan kepicikan berfikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan dibangun.

Dengan alasan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tertentu tersebut diharapkan pada pengambil kebijakan hendaklah sebelum melakukan penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat di sekitarnya dan

yang dianutnya, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.¹⁶

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan:

a. Pengembangan obyek-obyek wisata

Pengembangan obyek wisata ini dapat dilakukan pada dua segi, yaitu:¹⁷

1). Dari segi fisik

- a). Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi obyek wisata.
- b). Melengkapi sarana dan prasarana wisata yang sudah ada di lokasi obyek wisata.

2). Dari segi non fisik.

- a). Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.
- b). Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
- c). Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah seperti makanan khas dan erajinan khas.

b. Promosi

Disamping melalui pengembangan obyek-obyek wisata, dalam pengembangan kepariwisataan, pemerintah daerah juga perlu

¹⁶ Oka A. Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

¹⁷ Oka A. Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

melakukan promosi-promosi tentang pariwisata yang ada di daerahnya.. Dengan adanya promosi, maka orang-orang atau wisatawan akan mengetahui dengan jelas tentang obyek-obyek wisata yang ada pada suatu daerah atau negara, juga tentang kelebihan-kelebihan suatu daerah. Jadi, dengan adanya promosi, diharapkan daerah tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik tentang keindahan, kebudayaan maupun kekhasannya.¹⁸

4. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat daerah-daerah otonom. Dan pemerintahan di daerah-daerah otonom tersebut disebut sebagai “Pemerintah Daerah”.

Pemerintah daerah menurut Mariun adalah:

“Suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.”¹⁹

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

¹⁸ *Ibid*, hal 48.

¹⁹ *Mariun, Hukum Pemerintahan Daerah, UGM, Yogyakarta, 1999, hal 10.*

Pemberian kedudukan Propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :²⁰

Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas-asas dekonsentrasi.

b. Pembagian Daerah menurut UU no. 22 Tahun 1999

Dalam hal pembagian daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pertimbangan adalah :

- 1). Faktor kemampuan ekonomi.
- 2). Faktor potensi daerah.
- 3). Faktor sosial budaya.
- 4). Faktor sosial politik.
- 5). Faktor jumlah penduduk dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

²⁰ Dedi Supriadi, Brata Kusuma, Phd, Dadang solihin, M.A *Otonom Penyelenggaraan*

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah Propinsi, sedang daerah yang dibentuk berdasar asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

1). Daerah Propinsi

Daerah Propinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau arah perairan laut.

2). Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Daerah Kabupaten dan daerah Kota bersifat otonom, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

3). Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Kecamatan yang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi dan

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

4). Kelurahan Atau Desa

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai prangkat daerah Kabupaten dan atau daerah Kota di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan ini merupakan dinas bentukan daerah, atau unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada daerah secara penuh. Dan dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan melalui Sekertaris Daerah.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, posisi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah sebagai dinas penghasil, yang mana pemasukan atau pendapatan dari sektor pariwisata menjadi tumpuan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, dan sebagai dinas yang diandalkan bisa menjadi penyangga PAD Kabupaten Pacitan.

Maka dari itu, peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan obyek-obyek wisata di Pacitan sangat berarti bagi perkembangan dan pembangunan

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yaitu merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Ada pun pengertian dari definisi konsepsional dalam pembahasan ini adalah :

1. Peran adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.
2. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan perjalanan tersebut walaupun apa bentuknya harus dikaitkan dengan rekreasi dan orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya
3. Pengembangan pariwisata adalah pembangunan obyek wisata alam dan budaya agar dapat dinikmati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Disamping itu pengembangan obyek wisata ini juga dimaksudkan untuk melestarikan panorama dan budaya Indonesia.
4. Pemerintahan merupakan kegiatan terorganisir dalam artian sebagai kegiatan dari kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi.

F. Definisi Operasional

1. Peran Dinas Kebudayaan Dan pariwisata
2. Pembangunan Pariwisata
 - a. Pembangunan Fisik
 - b. Pembangunan Non Fisik
 - c. Pembenahan Sarana Dan Prasarana Wisata
3. Promosi Pariwisata
4. Pengelolaan Pariwisata

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Pada penelitian ini akan digunakan metode deskriptif atau analisa kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek wisata, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, fluktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk menguji kebenaran hipotesis diperlukan data yang

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dokumentasi.

Adalah cara pengumpulan data dengan mengutip data yang diperlukan penulis yang tersedia di kantor Pariwisata Kabupaten Pacitan.

c. Wawancara

Adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden

3. Unit analisis

Yang menjadi sumber informasi atau sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan, yang meliputi:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan
- b. Karyawan atau pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini diambil di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan, karena dinas ini mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek-obtekt wisata yang ada di Kabupaten Pacitan

5. Alasan Pemilihan Lokasi

Mengingat banyaknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan yang ternyata belum berkembang dengan baik. Dengan dilandasi semangat otonomi daerah, tentunya dituntut kemandirian terutama dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata daerah.

6. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan itu berupa data study kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

Dengan menggunakan teknik analisa data yang didapat di dalam penelitian (lapangan) tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur/ langkah dalam pengumpulan data kali ini sampai pada pengambilan generalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data atau informasi di lapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif/ kuantitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh di lapangan.
- c. Menyusun klasifikasi informasi di dalam data yang diperoleh.